

## Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hulu

Septialdo Nursukma<sup>1</sup>, Rizky Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

\* [septialdonursukma@student.uir.ac.id](mailto:septialdonursukma@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Belakangan ini rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat itu karena sikap apatis masyarakat terhadap aktivitas kegiatan politik. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu Presiden 2019 serta hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; informan dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU, Sekretariat, Kasubbag serta masyarakat. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian yaitu Peran KPU Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat sudah cukup optimal, upaya KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melibatkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa serta tokoh agama. Adapun hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat yaitu : Keterbatasan dana, SDM yang kurang memadai, sikap apatis masyarakat yang tidak peduli terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

**Kata Kunci : Peran, Partisipasi, Pemilihan Umum**

### Abstract

Lately, the low level of participation and public awareness is due to the apathy of the community towards political activities. The purpose of this research is to find out the role of the General Election Commission of Indragiri Hulu Regency in increasing voter participation in the 2019 Presidential election and its obstacles. The method used is descriptive and qualitative methods; informants in this study were KPU Commissioners, Secretariat, Head of Subdivision and the community. Observation and interview data collection techniques. The results of the study are the role of the Indragiri Hulu Regency KPU in increasing community political participation is quite optimal, the efforts of the Indragiri Hulu Regency KPU in increasing community political participation involve PPK (District Election Committee) and PPS (Voting Committee) and collaborate with community leaders, youth organizations, student organizations and religious leaders. The obstacles faced by the KPU of Indragiri Hulu Regency in increasing community political participation are: Limited funds, inadequate human resources, apathy of people who do not care about the 2019 Indonesian President and Vice President elections, lack of public trust in the government.

**Keywords: Role, Participation, General Election**

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi kuat dan amanah. Dalam penyelenggaraan proses demokrasi dibentuklah penyelenggaraan pemilihan umum yang dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22E ayat 5 UUD 1945 yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrumen hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagai pelaku penyelenggara pemilihan umum yang berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang substensial dan berkualitas, KPU harus melakukan segala bentuk pemilu tanpa harus dibantu organisasi lain (mandiri).

Belakangan ini rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat itu karena sikap apatis masyarakat terhadap aktivitas kegiatan politik dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian seperti bekerja kegiatan sosial, olahraga, bertamasya dan lain-lainnya yang dirasa memberikan manfaat lebih nyata terhadap individu masyarakat dibandingkan dengan partisipasi dalam politik.

Untuk mewujudkan kesadaran politik masyarakat dalam proses pemilihan umum lembaga KPU akan tersebar di tiap daerah untuk membantu mulai dari proses perencanaan maupun program kerja serta membantu menghitung perolehan suara dan hal-hal lainnya dalam pemilihan umum. Komisi pemilihan umum ini biasa disebut dengan komisi pemilihan umum daerah atau KPUD.

KPUD adalah komisi pemilihan umum daerah ditingkat provinsi atau kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang no. 32 tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi atau kota.

Partisipasi masyarakat sendiri, khususnya pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilu, yang dijabarkan sebagai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didalamnya terdapat kehadiran partisipasi masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam pemilu.

Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Partisipasi masyarakat sendiri, khususnya pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilu, yang dijabarkan sebagai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didalamnya terdapat kehadiran

partisipasi masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam pemilu.

Peneliti tertarik untuk membahas peran KPUD karena keberhasilan pemilu sangat dipengaruhi oleh peranan KPUD. Pada dasarnya peran KPUD dalam pemilu merupakan sarana untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang akan dipilih.

Dari hasil perolehan data diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 memiliki jumlah persentase yang lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan pemilu tahun 2014. Pada pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan presiden mencapai 79,39%. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan pemilu 2014 lalu, yaitu pada pemilihan presiden hanya mencapai 66,59%, dari total jumlah masyarakat kabupaten Indragiri Hulu yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap. Partisipasi yang meningkat ini diikuti dengan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun sebelumnya. Namun

Perilaku masyarakat kabupaten Indragiri Hulu dalam penggunaan hak pilih cenderung apatis dalam perhelatan demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada, hal ini disebabkan karena dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal adalah kecenderungan sikap apatis masyarakat yang disebabkan opini bahwa output dari Pemilu tidak memberikan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Faktor eksternal adalah, bahwa banyak nya orang-orang yang menduduki jabatan politik menjadi terpidana kasus korupsi, terjerat narkoba, dan tindak pidana lainnya. Kemudian hal-hal yang bersifat eksternal lainnya seperti permasalahan teknis, tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau disingkat DPT, dan tidak mendapatkan form pemberitahuan hari dan tanggal pemungutan suara. Faktor-faktor tersebut menjadi yang menentukan perilaku pemilih untuk memutuskan apakah masyarakat memilih utk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, atau memilih untuk tidak memilih.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif, yaitu metode yang diarahkan untuk menggambarkan atau memaparkan apa adanya hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana mestinya. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan.

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Raya P. Heran Km. 4 Kelurahan Pematang Reba. Kecamatan Rengat Barat, sebagai instansi yang berwenang. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hulu karena aspek geografis Indragiri Hulu yang memiliki akses sulit di beberapa kecamatan, ditambah di Indragiri Hulu memiliki suku pedalaman Talang Mamak bagaimana KPU memberikan pendidikan pemilih agar suku tersebut mengetahui pentingnya menggunakan hak pilih.

Informan dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Kasubbag KPU dan Masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam setiap pelaksanaan pemilu, partisipasi masyarakat memegang kunci penting karena menentukan sukses tidaknya suatu penyelenggaraan. Meski bukan jadi faktor satu-satunya, namun apabila partisipasi masyarakat rendah maka pemilu niscaya tidak berarti. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka

yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

### 1. Peranan Pribadi

Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda. Dalam mendapatkan informasi mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu penulis mewawancarai para informan dan mengelolah data yang didapatkan menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah untuk dipahami.

Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu sangat maksimal mulai dari sosialisasi kepada pemilih pemula, dengan mengadakan acara sosialisasi kepada mahasiswa dengan melibatkan pihak kampus seperti BEM kampus dan organisasi ekstra kampus yaitu HMI, sosialisasi kepada masyarakat di acara car free day, sosialisasi ke Lembaga Pemasarakatan, sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas & tunanetra, sampai sosialisasi kepada masyarakat di daerah yang terpencil. Hal ini tentunya sudah menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena pada pemilihan umum semua lapisan dan kalangan masyarakat mempunyai hak sama dalam menentukan pilihan. Pada sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 kepada perwakilan beberapa dari sekolah SMA dan SMK se Kabupaten Indragiri Hulu. Sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pendidikan politik, informasi politik mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019. Sosialisasi kepada perwakilan dari sekolah ini diharapkan mampu menjadi agen sosialisasi di sekolahnya masing-masing.

Dilokasi sosialisasi juga disediakan layanan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara online untuk masyarakat yang ingin mengetahui apakah namanya sudah tercantum pada Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sosialisasi langsung yang diberikan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga sudah melingkupi semua kalangan seperti contoh mengadakan sosialisasi kepada warga binaan LP perempuan dan sosialisasi kepada para disabilitas & tunanetra. KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan sosialisasi bahwa semua orang yang sudah sesuai persyaratan untuk memilih adalah hak masing-masing tanpa memandang bahwa orang tersebut warga binaan atau disabilitas & tunanetra, karena suara yang memilih nantinya akan berpengaruh terhadap hasil kedepannya. Dengan adanya sosialisasi kepada warga binaan LP perempuan dan disabilitas & tunanetra, diharapkan mereka untuk tetap melakukan pemilihan untuk memilih dan tidak menjadikan keterbatasan yang mereka hadapi saat ini menjadi penghalang untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019.

### 2. Peran berkaitan dengan informasi

Peran berkaitan dengan informasi (*information role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkungannya. Penyebaran informasi melalui alat peraga pada saat ini masih digunakan, seperti baliho, poster, panflet, pin, spanduk, stiker, topi, kaos. Konten atau isi bahan alat peraga tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat atau pasangan kandidat, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Pesan-pesan atau gambar yang dimuat bertujuan selain untuk memberikan informasi dengan alat peraga ini nantinya ada ajakan untuk melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden Indonesia 2019. Alat peraga juga sangat membantu kinerja dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena dengan alat peraga yang sudah ditempatkan di titik-titik tertentu yang sudah ditetapkan agar semua masyarakat mudah melihat dan alat peraga yang dipergunakan dikemas semenarik mungkin untuk menarik perhatian masyarakat dan masyarakat menjadi mengerti maksud yang disampaikan oleh alat peraga tersebut.

Keberadaan Alat Peraga seperti baliho, poster, pin, spanduk, stiker masih dipergunakan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk bersosialisasi diharapkan mampu menjangkau masyarakat untuk mendapatkan bekal informasi calon dan visi-misi serta mampu mengajak semua kalangan pemilih untuk memilih dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat yang telah disediakan. Yang kedua sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 tidak langsung melalui media sosial, pada zaman yang sudah modern seperti saat ini media sosial tentu menjadi sasaran untuk kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Dikarenakan banyak sekali orang yang menggunakan sosial media. Pemasangan poster ajakan mencoblos pemilu di pinggir jalan atau di balai desahnya dilihat sambil lalu, tapi poster yang tersebar di media sosial akan dilihat saat mereka bangun tidur, sela-sela waktu bekerja, saat mereka duduk minum kopi di kafe, sampai saat mereka hendak tidur lagi. KPU melihat fenomena ini sebagai kesempatan besar untuk mendorong partisipasi pemilih. Banyak keuntungan yang didapat dari sosialisasi melalui media sosial, salah satu keuntungannya yaitu tidak diperlukannya dana yang banyak untuk melakukan sosialisasi, tidak membuang banyak waktu yang dibutuhkan saat sosialisasi. Dengan memposting sosialisasi yang menarik perhatian tentunya semakin banyak orang yang mengetahui bahwa akan ada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019. KPU Kabupaten Indragiri Hulu sudah membuat hampir semua media sosial mulai dari facebook, twitter, website, dan instagram.

Sosialisasi melalui media sosial ini lebih menargetkan kepada calon pemilih yang sudah mengerti akan teknologi, terutama pemilih pemula yang lebih banyak menggunakan media sosial dengan memanfaatkan segala macam media sosial yang KPU punya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terutama kepada pemilih pemula. Dengan gencarnya sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 melalui media sosial, KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga masih menggunakan media lainnya seperti media cetak dan media elektronik, hanya saja media tersebut tidak segegar seperti dulu sebelum adanya media sosial. Karena masih banyak beberapa orang yang menggunakan media cetak dan media elektronik pada saat ini.

Dari penjelasan tentang indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengerahkan seluruh Sumber Daya Pendukung mereka seperti Sdm bantuan yang dikontrak oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk membantu hal-hal teknis seperti membantu KPU dalam menjalankan tugasnya, memberikan sosialisasi dan juga KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah menggunakan teknologi termasuk media sosial dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga upaya KPU dalam memberikan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan dan menarik minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019.

### 3. Peranan keputusan

Peranan keputusan (*decision making*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding. Agar suksesnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

tahun 2019 tentu tidak terlepas dari tersedianya logistik yang datang tepat waktu sebelum hari H pemilihan, dan juga tak terkecuali alat peraga kampanye yang harus di pasang terlebih dahulu sebelum pemilihan agar masyarakat mengenal lebih jelas siapa saja calon yang akan mereka pilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019.

Maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat menginginkan tokoh-tokoh yang baru muncul untuk memimpin provinsi riau ini, berikut penulis uraikan profil para calon yang maju pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019.

Ketua Kpu juga menambahkan bahwa kendala lain yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu adalah keterbatasan Dana, hal ini dikarenakan Dana yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019 ini adalah dana yang diturunkan Pemerintah Pusat kepada KPU Provinsi Riau. Kpu Provinsi Riau sebagai penyelenggara tingkat provinsi memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019. Sehingga KPU Kabupaten Indragiri Hulu memaksimalkan dana yang diturunkan oleh Kpu Provinsi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari penjelasan dan pemaparan tentang indikator diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa masih ditemukan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satu nya keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan dana yang diberikan Kpu Provinsi sebagai penyelenggara tingkat Provinsi.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat ( Studi Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019 ) dan uraian pada bab sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa:Peran KPU Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat sudah dilakukan secara optimal, namun permasalahannya adalah pada partisipasi masyarakatnya yang tidak bisa aktif dalam penyelenggaraannya. Cara meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan berbagai macam metode baik secara langsung seperti sosialisasi kepada pemilih pemula, sosialisasi kepada masyarakat melalui acara car free day, sosialiasi di lembaga pemasyarakatan serta sosialisasi di sekolah-sekolah negeri dan swasta, dan sosialisai tidak langsung seperti melalui media online, facebook, dan media massa seperti koran serta media cetak baliho spanduk. Upaya KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat juga melibatkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa serta tokoh agama.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat yaitu : Keterbatasan dana, SDM yang kurang memadai, sikap apatis masyarakat yang tidak peduli terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah akibat pelayanan publik yang kurang profesional, kurang percaya kepada calon peserta pemilihan yang selalu disii oleh tokoh-tokoh lama, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang kaderisasi partai tidak jelas, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilihan karena manajemen pendaftaran pemilih yang tidak baik sehingga banyak masyarakat yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Berdasarkan penelitian untuk menyempurnakan Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat ( Studi Pada



Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019 ), maka penulis menyarankan :

1. Saran kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyediakan SDM yang memadai sehingga sosialisasi tersampaikan kepada masyarakat secara merata, serata KPU Kabupaten Indragiri Hulu perlu memilih cara yang menarik dalam menyampaikan sosialisasi agar pemilih tertarik dan berminat untuk menggunakan hak pilihnya.
2. KPU Kabupaten Indragiri Hulu harus lebih banyak lagi mengadakan sosialisasi dan mengingatkan masyarakat betapa pentingnya untuk menggunakan hak pilihnya sehingga masyarakat tidak bersikap apatis dengan menyia-nyiakkan hak suara yang mereka miliki.
3. Saran kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu bahwa perlu adanya evaluasi di dalam manajemen system data pemilih (SIDALIH), hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar di Sidalih yang mengakibatkan masyarakat tidak bias menggunakan hak suara nya karena tidak terdaftar didalam DPT, inilah yang mengakibatkan masyarakat banyak yang malas untuk dating ke TPS karena harus menunggu jam 12.00 siang untuk bisa memilih.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Djuyandi, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Politik, Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harun, R. d. (2006). *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Labolo, M. d. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lestari, E. W. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Kependudukan*. *Publika*.
- Muhammad Hidayansyah, d. (2018). Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Malang. *Jurnal Civic Hukum*.
- Musanef. (2002). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi dengan kepomongprajaan*. Jarum Dengan Benang.
- Nelson, H. S. (1990). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum . (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . (n.d.).
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 242-263 .

- Pratama, B. B. (2019). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Gotong Royong Di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Pemerintahan Integratif*.
- Putra, Y. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jom FISIP*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-11/2013 . (n.d.).
- Rahmawati, Y. S. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung. *Jurnal Signal*.
- Rasyid, R. (1997). *Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Sedarmayanti. (2004). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, EdisiBaru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafiie, K. I. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taliziduhu, N. (2005). *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (n.d.).
- Wahyudi, A. (2014). *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.